

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. syakir Media Press
- Buku Profile Desa Manistutu
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. (2023). *Statistik Industri*. Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. (2024). *Statistik Potensi Desa Kabupaten Jembrana*. Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. (2024). *Kecamatan Melaya Dalam Angka Melaya District In Figure*. Jembrana: BPS Kabupaten Jembrana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Gozhali. (2008). *Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam*. Al-Qānūn.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., & dkk. (2024). *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press .
- Mulyadi. (2018). *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulyadi, L. (2022). *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, d. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Perumahan Palur Wetan, Madiun: Oase Pustaka .
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Qamar, R. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn).

- Ragawino. (2009). *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA*. Pustaka Ilmiah.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Antasari Press.
- Rahmawati, N.N. (2015). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu). *Studi Kultural*.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sahir, H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Banguntapan, Bantul-Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Seregig. (2014). *Filsafat Desa Adat Bali*: Penerbit Paramita Surabaya.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Supomo. (2007). *Bab-bab tentang hukum adat oleh R. Soepomo*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tamaulina, dkk. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Tanjungmekar, Karawang Barat: CV Saba Jaya Publisher.
- Utama, I. G., Sumartana, M., & Waruwu, D. (2021). *Bali membangun Bali*. Denpasar: Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus & Bali Shanti.
- Warsono. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik
- Wahid. (2022). *Pandangan Ibnu Kafsir dan M. Quraish Shihab Seputar Kemahraman Anak Tiri*. Kota banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
- Zami, S. Z. (2019). Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali di Karangasem Bali dengan Hukum Waris Adat Bali Pada Suku Tengger. *Dinamika*.

Artikel dalam Jurnal:

- Arif, d. B. (2020). Konsep Relasi Anak dan Orang Tua . *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* , 27-43.
- Bagus, dkk. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-20.

- Bawananta, d. (2017). Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. *Adminpkn*, 1-10.
- Camelia. (2023). Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal Of Social Science Research*, 603-610.
- Chrisdanty. (2016). Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja. *Maksigama Jurnal Hukum*, 36-46.
- Dianti, U.d. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. *Yustitia*, 1-7.
- Fatia, d. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum . *Jurnal Analogi Hukum*, 34-40.
- Fitriani. (2023). Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* , 38-47.
- Faradz. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 153-159.
- Gita Yani, d. (2021). Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Preferensi Hukum* , 150 - 155.
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 26-35.
- Indriani. (2024). Dualisme Hukum Penetapan Adopsi Anak. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1466-1477.
- Iryana. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Paper Ina-Rxiv*, 1-17.
- Joseph, d. (2023). Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat .*Pattimura Law Study Review*, 409-414.
- Karyasa Putra, d. (2022). Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara. *Unizar Recht Journal*, 442-449.
- Mahmurodhi. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. *Hukum dan Keadilan*, 188-207.
- Munib. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 37-48.

- Naskur. (2018). Ahli waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal IAIN Manado*, 1-16.
- Nuzha. (2019). Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 118-135.
- Niken Pratiwi, d. (2023). Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUH Perdata. *Mimbar Yustitia*, 91-104.
- Pongoh, S. (2019). Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *Lex Privatum*, 128-135.
- Prijanto. (2021). Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 702 - 708.
- Pudihang. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 151-160.
- Pramana. (2017). Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Terlantar Di Bali. *Media Neliti*, 12-23.
- Rata, K. D. (2020). Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali . *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 611-620.
- Rihi, M. W. (2006). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Selatan. *Tesis (Tidak Diterbitkan)*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ritonga, d. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam . *Journal of Civil and Bussiness Law*, 512 - 525.
- Sidek, d. (2018). Analisis Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya. *Jurnal Hukum Islam*, 216-227.
- Sari, Z. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 308-316.
- Siregar, d. (2022). Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Persepektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-8.
- Sitti Aulia, d. T. (2024). Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021) . *Unes Law review*, 9990-9996.

- Suhartono, d. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata . *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*, 204-214.
- Sunaradana, d. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 274-280.
- Suryanata. (2021). Hukum waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu* , 1-19.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 413-434.
- Tamba. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal HK*, 1-6.
- Trijayanti. (2017). Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah*, 2-14.
- Wardana, P. (2022). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Penitipan Wasiat Olografis Kepada Notaris. *Jurnal Kertha Wicara*, 458-473.
- Wawit, S. (2018). Implikasi Hukum Persetujuan Ahli Waris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Terkait Pembagian Hak Bersama. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 35-52.
- Widihastuti, d. (2022). Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantai di DIY. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 2-9.
- Winarti, d. (2024). Problematika Hak Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1-8.
- Yurahman, F. (2023). Kekuatan Hukum Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Putusan MA Nomor 279K/Pdt/2019. *Media of Law and Sharia*, 287-300.

Skripsi

Selviana Jima. 2022. *Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laki- laki dan Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai*.
Universitas Pendidikan Ganesha FHIS.

Pratiwi. 2022. *Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Studi Kasus Desa Batuagung Jembrana*. Universitas Pendidikan Ganesha FHIS.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 6 Tahun 1983. Mahkamah Agung Republik Indonesia 1983.

Pengadilan Negeri Negara. 2014. *Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2014/PN.Nga tentang Pengangkatan Anak.*

Desa Adat Manistutu. 2011. *Awig-Awig Desa Manistutu*

